

# IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT)

<sup>1</sup>Abdurrahim, <sup>2</sup>Dwi Nur Hidayati, <sup>3</sup>Budiarto

<sup>1,2</sup>. Akademi Sekretari dan Manajemen Mataram

<sup>3</sup> Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Mataram

<sup>1</sup>y24197@yahoo.com

## **Abstract**

*This study is intended to determine the factors that influence the success of local governments in the implementation of PP 71/2010 on Accrual Based Government Accounting Standard. This quantitative research employs the regression method to analyse the regulations, human resources, commitment, other supporting elements and training which seem to influence the accomplishment of local governments in the implementation of PP 71/2010 on Accrual Based Government Accounting Standard. The population of the study is the regional finance management personnel in 32 Government Work Units (SKPD) within the district government of West Lombok comprising of head of SKPD and/or the finance administration officer (PPK), treasurer, and the planning staff. Sample is selected through the purposive sampling technique in which 96 respondents are given questionnaires. Only 71 respondents return the questionnaires. Likert scale is used for the data measurement. The result of the study shows that regulation, human resources, commitment, other supporting, and training elements partially and simultaneously have positive effect to the accomplishment of local governments in the implementation of PP 71/2010 on Accrual Based Government Accounting Standard.*

**Keywords:** *Implementation PP 71/2010, regulation, human resources, commitment, supporting elements, training.*

## **Abstrak**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemerintah daerah dalam penerapan PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif yang akan diuji dengan menggunakan metode regresi untuk menganalisis pengaruh regulasi, sumber daya manusia, komitmen, perangkat pendukung dan pelatihan terhadap keberhasilan pemerintah daerah dalam implementasi PP 71/2010 tentang SAP Berbasis Akrua. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pengelola keuangan daerah pada 32 unit satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang terdiri dari kepala SKPD dan / atau petugas administrasi keuangan (PPK), bendahara, dan staf perencanaan. Sampel dipilih melalui teknik purposive sampling di mana dari 96 responden yang diberikan kuesioner hanya 71 responden mengembalikan kuesioner. Pengukuran data menggunakan skala likert. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi, sumber daya manusia, komitmen, perangkat pendukung, dan pelatihan secara parsial dan simultan berpengaruh positif terhadap implementasi pemerintah daerah dalam penerapan PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.

**Kata kunci:** implementasi pp 71/2010, regulasi, sumber daya manusia, komitmen, perangkat pendukung, pelatihan

## PENDAHULUAN

Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan kapabilitas dan efektivitas dalam menjalankan roda pemerintahan. Namun pada kenyataannya, pemerintah daerah umumnya belum menjalankan fungsi dan peranan secara efisien, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah (Halim *et al*, 2007: 23). Pengelolaan keuangan daerah, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Halim *et al*, 2007: 24). Dalam hal ini, pedoman dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua.

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang selanjutnya disebut PP 71/2010 harus diiringi dengan keberhasilan pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan PP 71/2010. Saat ini, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri 64/2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah dapat ditinjau dari: 1) Persepsi aparatur pemerintah daerah terhadap perubahan regulasi, sebagaimana beberapa studi tentang pengaruh perubahan regulasi, yaitu Bastian (2006: 8), Araújo (1999) dalam Jorge *et al*. (2007), Yang (1994) dalam Chow (1995) dan Azhar (2007). 2) Keberhasilan SDM (Christiaens *et al.*, 2007; Jorge *et al.*, 2007 dan Azhar 2007; Bastian, 2006; Luder *et al.*, 2003 dalam Christiaens *et al.*,2007; dan Fernandes, 2004 dalam Jorge *et al.*, 2007); 3) Komitmen dari aparatur pemerintah (Bastian, 2006: 7; Christiaens *et al.*, 2007; dan Azhar, 2007); 4) Perangkat pendukung yang ada (Halim *et al*, 2007: 41-42; Tik, 2010; dan Azhar 2007); dan 5) Pelatihan yang relevan (Bastian, 2006: 9; Christiaens *et al*, 2007; Luder *et al.*, 2003 dalam Christiaens *et al.*,2007; dan Fernandes, 2004 dalam Jorge *et al.*, 2007).

Selanjutnya, peneliti menggunakan faktor regulasi, SDM, komitmen, perangkat pendukung, dan adanya pelatihan sebagai faktor-faktor yang diduga akan berpengaruh dalam keberhasilan pemerintah daerah dalam implementasi PP 71/2010 tentang SAP Berbasis Akrua. Hasil pengamatan awal terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah selama 5 (lima) tahun terakhir sejak tahun 2013 – 2017 berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa pada 2013 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan pada 2014 – 2017 atau empat tahun berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, hal ini menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan penelitian tentang keberhasilan pengelolaan keuangan daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), khususnya keberhasilan daerah dalam implementasi PP 71/2010 tentang SAP Berbasis Akrua.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Apakah regulasi, SDM, komitmen, perangkat pendukung, dan pelatihan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemerintah daerah dalam implementasi PP 71/2010 tentang SAP Berbasis Akrua?”

## KAJIAN PUSTAKA

### Standar Akuntansi Pemerintahan

Penetapan sebuah standar akuntansi di lingkungan pemerintah dirasakan sangat penting, sebagai salah satu kunci transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan oleh sektor pemerintah. Menurut Mardiasmo (2009:148) standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan, sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktek khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar.

Standar akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan obyektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan dalam pengauditan (Halim *et al.*, 2007: 124). Pemerintah Indonesia menerbitkan Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 pada tanggal 6 Juli 2005. Selanjutnya, pada bulan Oktober 2010 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akruwal, sebagai pengganti PP 24/2005. SAP Akruwal dikembangkan dari SAP yang ditetapkan dalam PP 24/2005 dengan mengacu pada *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)* dan memperhatikan peraturan perundangan serta kondisi Indonesia.

Implementasi PP 71/2010 secara bertahap pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan strategi penerapan SAP Berbasis Akruwal pada tahun 2011 meliputi: 1) Penyiapan aturan pelaksanaan dan kebijakan akuntansi; 2) Pengembangan Sistem Akuntansi dan Teknologi Informasi; dan 3) Pengembangan kapasitas SDM dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan sebelumnya yakni, UU 17/2003 dan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sesuai PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 13/2006, *jo* Permendagri 59/2007, *jo* Permendagri 21/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No.64/2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal pada Pemerintah Daerah.

Beberapa literatur dan penelitian yang berhubungan dengan reformasi akuntansi pemerintah atau reformasi akuntansi akruwal (Yang, 1994 dalam Chow *et al.*, 1995; Christiaens dan Peteghem, 2007; Jorge *et al.*, 2007; Christiaens dan Rommel, 2008; dan Tikk, 2010) menyatakan implementasi akuntansi akruwal pada awal reformasi mengalami permasalahan pelaksanaan konseptual. Reformasi akuntansi pemerintahan dapat dianggap sebagai kondisi penting bagi keberhasilan reformasi konsekuensi lainnya. Oleh karena itu, sebuah implementasi yang memadai tentang reformasi akuntansi memegang peranan penting dalam keberhasilan reformasi manajemen pemerintahan, khususnya ketika mengimplementasikan reformasi akuntansi pemerintahan (Christiaens dan Peteghem, 2007). Jorge *et al.* (2007) menyatakan bahwa masalah penting dalam pelaksanaan basis akruwal berkaitan dengan pencatatan dan penentuan nilai aset domain publik. Masalah-masalah praktis dalam pengembangan reformasi akuntansi antara lain kerangka yang mendasari akuntansi akruwal tidak selaras dengan konteks pemerintah (Christiaens dan Rommel, 2008). Selanjutnya, masalah besar yang perlu dipecahkan muncul dari proses transisi ke basis akuntansi akruwal (Tikk, 2010).

### Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan

pengawasan keuangan daerah (Halim *et al.*, 2007: 24). Menurut Devas dkk. (1987: 279) pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut: 1) Tanggungjawab (*accountability*), 2) Mampu memenuhi kewajiban keuangan, 3) Kejujuran, 4) Hasil guna (*effectiveness*) dan daya guna (*efficiency*), dan 5) Pengendalian.

Coy dan Dixon (2004) menyelidiki perubahan kualitas laporan tahunan untuk tahun 1996 dan 2000 dari delapan universitas Selandia Baru dengan menggunakan indeks akuntabilitas publik (PAI). Mereka mengungkapkan perubahan hasil, dengan peningkatan secara keseluruhan kualitas laporan tahunan di periode pertama 1992-1996, namun kedua negatif dan evolusi positif selama periode kedua, 1996-2000. Semua hasil penelitian sebelumnya menunjukkan sedikit perbaikan dari waktu ke waktu, tetapi dengan sedikit perhatian atau tidak ada efek mengatur diri sendiri reformasi akuntansi pemerintahan dan penentu mungkin menjelaskan evolusi.

Penelitian terdahulu mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang penerapan SAP Berbasis Akrua dapat ditemukan dalam penelitian Kristiawati (2015), Putra, dkk (2015), Adirianto, dkk (2017), yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Daerah. Hasil analisis dari ketiga peneliti tersebut menyimpulkan bahwa komitmen, SDM, gaya kepemimpinan, dan perangkat pendukung termasuk sistem informasi akuntansi secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan penerapan SAP Berbasis Akrua.

### **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pemerintah Daerah Dalam Implementasi PP 71/2010 Tentang SAP Berbasis Akrua**

Faktor-faktor yang akan mempengaruhi pemerintah daerah dalam implementasi PP 71/2010 tentang SAP Berbasis Akrua adalah: regulasi, SDM, komitmen, perangkat pendukung, dan pelatihan bagi petugas pengelola keuangan sebagaimana diuraikan di bawah ini :

#### **1) Regulasi dan Implementasi PP 71/2010**

Regulasi, sebagai layaknya untuk setiap perubahan, pihak internal yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama, akan enggan mengikuti perubahan. Beberapa tantangan dalam implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan diantaranya adalah resistensi terhadap perubahan (Bastian 2006: 8). Araújo (1999) dalam Jorge *et al.* (2007) menjelaskan, bahwa penekanan pada aturan hukum, tradisi birokrasi dan perlawanan terhadap perubahan, terpusat, kontrol melalui hirarki, dan fokus pada proses input, telah menghambat keberhasilan reformasi akuntansi (akrua). Jorge *et al.* (2007) mengungkapkan bahwa keterlambatan dalam pelaksanaan kerangka akuntansi pemerintah yang baru, di antara faktor-faktor lain, adalah masalah yang terkait dengan pengenalan akuntansi akrual. Yang (1994) dalam Chow *et al.* (1995) mengungkapkan bahwa pada awal penerapan standar akuntansi di China pelaporan keuangan yang menekankan regulasi profesional dan justifikasi, adanya pertimbangan budaya, akan sangat sulit dicapai dalam praktek. Namun, penelitian Azhar (2007) menyimpulkan bahwa regulasi tidak mempengaruhi terhadap keberhasilan penerapan Permendagri 13/2006.

Dalam penelitian ini, regulasi adalah persepsi responden tentang perubahan peraturan, keputusan dan perundangan dalam waktu yang singkat, dan perubahan tersebut sangat berbeda dengan peraturan sebelumnya, dan dipandang sebagai suatu keadaan yang mempengaruhi keberhasilan pemerintah daerah dalam implementasi PP 71/2010.

#### **2) Sumber Daya Manusia (SDM) dan Implementasi PP 71/2010**

Hasil penelitian Christiaens *et al.* (2007), menunjukkan tiga variabel (dukungan konsultan, pelatihan lanjutan staf akuntansi, dan ukuran kota) merupakan variabel penentu

yang penting dalam tahun pertama pelaksanaan reformasi akuntansi pemerintahan kota Flemish. Pengalaman di Portugal, sesuai laporan *Public Administration Accounting Standardization Commission (PAASC)* tahun 2003 menyimpulkan antara lain bahwa penerapan sistem yang baru (basis akrual) masih dalam tahap dengan masalah yang kompleks dan kesulitan untuk mengatasinya, serta sebagian besar berkaitan dengan kesesuaian aplikasi *software* dan ketidakcukupan SDM yang berkualitas. *The Court of Accounts* (2003) antara lain mengungkapkan hal-hal terpenting dalam pelaksanaan sistem akuntansi baru (akrual) adalah: 1) Kesulitan dalam integrasi program *software*, 2) Kekurangan SDM dan keuangan, 3) Kesulitan dalam menyajikan beberapa laporan keuangan, seperti Neraca dan Laporan Operasional, 4) Membutuhkan reformulasi sistem pengendalian internal, dan 5) Kekurangan kelompok pendukung teknis (Jorge *et al.*, 2007). Hal ini juga didukung oleh penelitian Azhar (2007) mengenai keberhasilan penerapan Permendagri 13/2006 pada Pemerintah Kota Banda Aceh yang menyimpulkan bahwa SDM berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan Permendagri 13/2006. Dalam penelitian ini, SDM dipandang sebagai suatu dukungan yang kuat terhadap keberhasilan daerah dalam implementasi PP 71/2010.

### 3) Komitmen dan Implementasi PP 71/2010

Faktor komitmen dalam implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Diundangkannya tiga paket keuangan negara serta undang-undang pemerintahan daerah menunjukkan keinginan yang kuat dari pihak eksekutif dan pihak legislatif untuk memperbaiki sistem keuangan negara, termasuk perbaikan atas akuntansi pemerintahan (Bastian, 2006: 7). Hasil penelitian Christiaens *et al.* (2007), misalnya menunjukkan bahwa komitmen para pembuat keputusan mungkin faktor lain yang relevan. Pengalaman Selandia Baru (IFAC PSC, 1994) mengetahui bahwa tanpa komitmen pengambil keputusan dalam menggunakan informasi akrual, pelaksanaan reformasi akuntansi pemerintah tidak mungkin berhasil. Sebuah pernyataan yang didukung oleh Ryan (1998) dalam Christiaens *et al.* (2007) berpendapat bahwa keberhasilan inovasi tergantung pada iklim penerimaan antara pemerintah (Ryan, 1998). Studi di AS menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi karena kepentingan peningkatan dalam pengungkapan keuangan kota (Allen dan Sanders, 1994). Hal ini juga didukung oleh penelitian Azhar (2007) mengenai keberhasilan penerapan Permendagri 13/2006 pada Pemerintah Kota Banda Aceh yang menyimpulkan bahwa komitmen berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan Permendagri 13/2006. Dalam kaitan dengan penelitian ini, komitmen dipandang sebagai suatu keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap keberhasilan daerah dalam implementasi PP 71/2010.

### 4) Perangkat Pendukung dan Implementasi PP 71/2010

Perangkat pendukung adalah alat untuk mendukung terlaksananya kegiatan atau pekerjaan seperti komputer (*hardware*), *software* dan lain-lain. Semakin kompleksnya aktivitas pemerintah daerah dan pusat dalam menjalankan roda pemerintahan, maka informasi menjadi dasar pengambilan keputusan yang akurat, tepat sasaran, dan tidak ketinggalan jaman bagi *stakeholder* (Halim *et al.*, 2007: 41-42). Hasil penelitian Tikk (2010) mengungkapkan penerapan akuntansi akrual dalam entitas sektor publik Estonia dilakukan dengan berbagai upaya untuk menciptakan sistem akuntansi kontemporer di sektor publik. Sebuah pondasi yang memadai telah diletakkan untuk transisi ke akuntansi akrual secara penuh, yang juga didukung dengan mengembangkan sistem teknologi informasi (Tikk, 2010).

Perangkat pendukung ini diukur berdasarkan ketersediaan perangkat pendukung dan kemutakhirannya. Dalam kaitan dengan penelitian ini, perangkat pendukung dipandang

sebagai suatu keadaan yang akan mempengaruhi keberhasilan daerah dalam implementasi PP 71/2010.

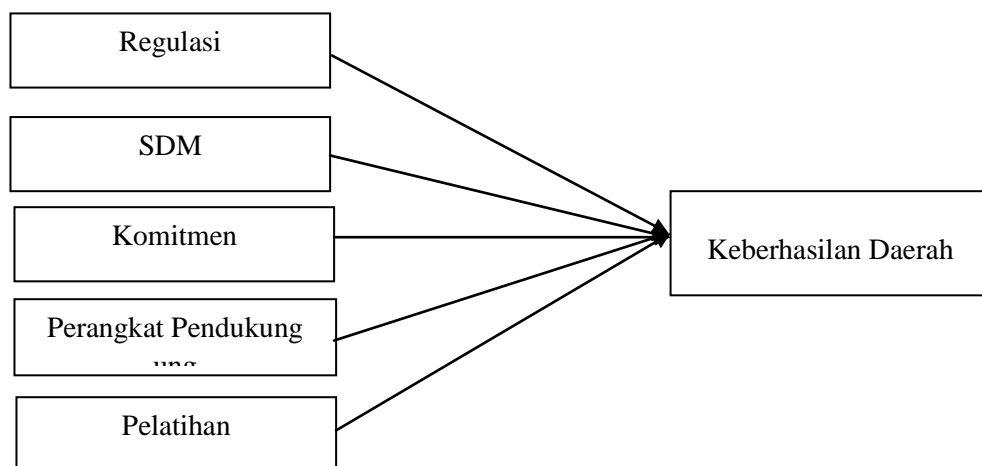
**5) Pelatihan dan Implementasi PP 71/2010**

Pelatihan relevan yang diikuti oleh petugas pengelolaan keuangan daerah adalah upaya peningkatan pengetahuan dan ketarampilan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat mendukung tercapainya tujuan pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian Christiaens *et al.* (2007), misalnya mengungkapkan bahwa dukungan profesional dan pelatihan staf akuntansi merupakan variabel penentu yang penting pada tahun pertama pelaksanaan reformasi akuntansi pemerintahan kota Flemish. Kota yang melaksanakan pelatihan terhadap stafnya, menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Luder *et al.* (2003) dalam Christiaens *et al.* (2007) menunjukkan bahwa pelatihan terhadap staf akuntansi yang berkelanjutan dalam teknik akuntansi dapat diharapkan tingkat kepatuhannya dalam penerapan reformasi akuntansi pemerintahan lebih signifikan. Dalam kaitan dengan penelitian ini, pelatihan dipandang sebagai suatu dukungan kompetensi yang akan mempengaruhi keberhasilan daerah dalam implementasi PP 71/2010.

**Rerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis**

**Rerangka Pemikiran**

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan landasan teori yang diuraikan di depan, bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebagai variabel independen adalah: regulasi, SDM, komitmen, perangkat pendukung, dan pelatihan; sedangkan variabel dependen adalah keberhasilan daerah dalam implementasi PP 71/2010 tentang SAP Berbasis Akrual. Hubungan variabel independen terhadap variabel dependen digambarkan dalam rerangka pemikiran berikut ini :



**Gambar 1. Rerangka Pemikiran**

**Pengembangan Hipotesis**

Regulasi, sebagai layaknya untuk setiap perubahan, pihak internal yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama, akan enggan mengikuti perubahan. Beberapa hasil penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa regulasi berpengaruh terhadap keberhasilan reformasi akuntansi (Bastian, 2006: 8; Araújo, 1999 dalam Jorge *et al.*, 2007; Yang, 1994 dalam Chow *et al.*, 1995); walaupun penelitian Azhar (2007) menyimpulkan bahwa regulasi tidak mempengaruhi terhadap keberhasilan penerapan Permendagri 13/2006.

Mengenai SDM, hasil penelitian Christiaens *et al.* (2007), laporan *Public Administration Accounting Standardization Commission (PAASC)* tahun 2003, dan *The*

*Court of Accounts* (2003) antara lain mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan sistem akuntansi baru (akrual) adalah kekurangan kelompok pendukung teknis (Jorge *et al.*, 2007). Hasil penelitian Azhar (2007) mengenai keberhasilan penerapan Permendagri 13/2006 pada Pemerintah Kota Banda Aceh yang menyimpulkan bahwa SDM berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan Permendagri 13/2006. Hasil penelitian Luder *et al.* (2003) dalam Christiaens *et al.* (2007) dan Fernandes (2004) dalam Jorge *et al.* (2007), mengungkapkan bahwa pelatihan staf akuntansi merupakan variabel penentu yang penting pada tahun pertama pelaksanaan reformasi akuntansi pemerintahan dan memberikan pelayanan akuntansi yang responsif.

Dalam hal komitmen sebagai variabel independen, hasil penelitian Allen dan Sanders (1994), Ryan (1998), Christiaens *et al.* (2007), dan Azhar (2007) menunjukkan bahwa komitmen para pembuat keputusan berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan reformasi akuntansi pemerintahan.

Faktor perangkat pendukung dalam implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan berupa teknologi informasi berperan dalam upaya pemerintah untuk lebih akuntabel dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Semakin kompleksnya aktivitas pemerintah daerah dan pusat dalam menjalankan roda pemerintahan, maka informasi menjadi dasar pengambilan keputusan yang akurat, tepat sasaran, dan tidak ketinggalan jaman bagi *stakeholder* (Halim *et al.*, 2007: 41-42). Hasil penelitian Tikk (2010) dan Azhar (2007) mengungkapkan penerapan akuntansi akrual dalam entitas sektor publik didukung dengan mengembangkan sistem teknologi informasi, dan bahwa perangkat pendukung berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan reformasi akuntansi.

Selanjutnya, faktor-faktor tersebut secara bersama-sama mempengaruhi keberhasilan daerah dalam implementasi PP 71/2010 tentang SAP Berbasis Akrual. Keberhasilan dalam implementasi dimaksud dapat ditunjukkan antara lain dengan tingkat penyelesaian penyusunan Laporan Keuangan, yang mencakup: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

*H<sub>1</sub>: Regulasi, SDM, Komitmen, Perangkat Pendukung, dan Pelatihan Mempunyai Pengaruh terhadap Keberhasilan Daerah dalam Implementasi PP 71/2010 tentang SAP Berbasis Akrual”.*

## **METODE PENELITIAN**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pengelola keuangan pada 32 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Responden yang dipilih, dengan metode *purposive sampling*, dengan kriteria antara lain pejabat dan/atau aparatur yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah di masing-masing SKPD yaitu Kepala SKPD atau Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Penerimaan/Pengeluaran, dan Staf Perencanaan.

Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah responden direncanakan sebanyak 96 orang yang menjadi responden, dan yang mengembalikan jawaban kuisisioner sebanyak 71 responden. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif dan regresi linier berganda. Sebelum melakukan analisis statistik deskriptif, dilakukan uji validitas dan reliabilitas atas seluruh pertanyaan/pernyataan yang ada dalam kuisisioner, untuk mengetahui apakah pernyataan yang digunakan telah valid dan reliabel untuk diuji. Hasil pengujian bahwa seluruh pernyataan yang digunakan telah valid dan reliabel. Selanjutnya dilakukan analisis statistik deskriptif. Kemudian dilakukan uji asumsi klasik

yang terdiri atas uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, serta dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, yaitu uji t dan uji F.

Berdasarkan hipotesis yang diajukan, maka model penelitian dapat dibuat sebagai berikut:

$$\text{Keberhasilan Daerah dalam Implementasi PP 71/2010} = \beta_0 + \beta_1 \text{Regulasi} + \beta_2 \text{Komitmen} + \beta_3 \text{SDM} + \beta_4 \text{Perangkat Pendukung} + e$$

Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan analisa regresi berganda. Pengujian hipotesis ditujukan untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari variabel independent secara keseluruhan terhadap varibel dependen. Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji F atau yang biasa disebut dengan *Analysis of Varian* (ANOVA).

Pengujian dengan membandingkan F-hitung dengan F-tabel dilakukan dengan ketentuan yaitu apabila F-hitung > F-tabel ( $\alpha$  0,05), maka  $H_0$  ditolak (berpengaruh), sementara sebaliknya apabila F-hitung < F-tabel ( $\alpha$  0,05), maka  $H_0$  diterima (tidak berpengaruh). Adapun F tabel dicari dengan memperhatikan tingkat kepercayaan ( $\alpha$ ) dan derajat bebas (*degree of freedom*)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Penelitian yang dilakukan sesuai metode penelitian yang telah diuraikan di atas diperoleh data yang selanjutnya dengan analisis statistik diperoleh hasil penelitian. Data penelitian yang digunakan adalah data primer berupa jawaban responden atas kuesioner yang telah dikirim sebanyak 71 orang dari yang direncanakan sebanyak 96 orang.

Hipotesis yang akan diuji adalah pengaruh regulasi, SDM, komitmen, perangkat pendukung, dan pelatihan terhadap keberhasilan daerah dalam implementasi PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Ringkasan hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1. Ringkasan Pengujian Hipotesis**

Model	Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient	T	Sig
	B	Std Error	Beta		
Constant	-2.276	0.625		-3.642	0.001
Regulasi (X1)	0.548	0.111	0.484	4.955	0.000
SDM (X2)	0.655	0.113	0.462	5.783	0.000
Komitmen (X3)	0.232	0.083	0.231	2.797	0.007
Perangkat Pendukung (X4)	0.052	0.123	0.047	2.421	0.009
Pelatihan (X5)	0.118	0.101	0.109	3.160	0.001
R	= 0.772				
R <sup>2</sup>	= 0.596				
Adjusted R <sup>2</sup>	= 0.565				
F	= 19.148				
Sig. F	= 0.000				

Hasil uji hipotesis yang telah dilakukan tersebut ditunjukkan dalam model penelitian sebagai berikut:



$$Y = -2.276 + 0.548 X_1 + 0.655 X_2 + 0.232 X_3 + 0.052 X_4 + 0.118 X_5 + e$$

Berdasarkan persamaan di atas, dapat dilihat bahwa koefisien dari variabel independen masing-masing bertanda positif, yang berarti bahwa keberhasilan daerah dalam implementasi PP 71/2010 tentang SAP Berbasis Akruwal akan meningkat dengan adanya peningkatan dalam hal SDM, komitmen, perangkat pendukung, dan pelatihan, termasuk adanya perubahan regulasi. Nilai statistik F dapat digunakan untuk menilai *goodness of fit* suatu model penelitian (Kuncoro, 2007: 81). Dari uji statistik F atau tabel ANOVA, diperoleh nilai F hitung dengan tingkat signifikansi 19.148. Karena probabilitas 0.000 lebih kecil dari 0.05 maka hasil dari model regresi menunjukkan bahwa regulasi, SDM, komitmen, perangkat pendukung, dan pelatihan yang relevan secara bersama-sama (*simultan*) berpengaruh terhadap keberhasilan daerah dalam implementasi PP 71/2010 tentang SAP Berbasis Akruwal.

### Pembahasan

Hasil penelitian sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1 di atas bahwa regulasi berpengaruh terhadap keberhasilan daerah dalam implementasi PP 71/2010 tentang SAP Berbasis Akruwal ( $B = 0.548$ ;  $t = 4.955$ ). Hasil ini menolak hasil penelitian Azhar (2007). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengaruh positif dari regulasi berbeda dengan pernyataan Bastian (2006), Araújo (1999) dalam Jorge *et al.* (2007), dan Yang (1994) dalam Chow (1995). Perbedaan ini terjadi karena perubahan regulasi dengan diundangkannya PP 71/2010 tentang SAP Berbasis Akruwal, dalam implementasinya dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akruwal menjadi penerapan SAP Berbasis Akruwal paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010 atau sampai dengan tahun 2014. Dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2010 mengacu pada PP71/2010 khususnya sesuai dengan Lampiran II PP71/2010 yakni penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akruwal.

Sumber daya manusia (SDM) sangat berperan dalam keberhasilan daerah dalam implementasi PP 71/2010 tentang SAP Berbasis Akruwal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SDM berpengaruh terhadap keberhasilan daerah dalam implementasi PP 71/2010 tentang SAP Berbasis Akruwal ( $B = 0.655$ ;  $t = 5.783$ ). Hal ini mendukung hasil penelitian Azhar (2007), Christiaens *et al.* (2007), laporan *Public Administration Accounting Standardization Commission (PAASC)* tahun 2003, (Jorge *et al.*, 2007), Bastian (2006), Luder *et al.* (2003) dalam Christiaens *et al.* (2007).

Faktor komitmen berpengaruh positif terhadap keberhasilan daerah dalam implementasi PP 71/2010 tentang SAP Berbasis Akruwal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen dari aparatur pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap keberhasilan daerah dalam implementasi PP 71/2010 tentang SAP Berbasis Akruwal ( $B = 0.232$ ;  $t = 2.797$ ). Hal ini juga mendukung hasil penelitian Azhar (2007), Christiaens *et al.* (2007), Ryan (1998) dalam Christiaens *et al.* (2007), Allen dan Sanders (1994).

Adapun mengenai perangkat pendukung dan sistem informasi yang mempengaruhi keberhasilan daerah dalam implementasi PP 71/2010 tentang SAP Berbasis Akruwal ( $B = 0.052$ ;  $t = 2.421$ ), hal ini mendukung hasil penelitian Azhar (2007), Tikk (2010) dan pernyataan Halim *et al.* (2007).

Adanya pelatihan yang relevan juga berpengaruh terhadap keberhasilan daerah dalam implementasi PP 71/2010 tentang SAP Berbasis Akruwal. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa adanya pelatihan yang relevan dalam pengelolaan keuangan daerah mempengaruhi keberhasilan daerah dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ( $B = 0.118$ ;  $t = 3.160$ ). Hal ini mendukung hasil penelitian Christiaens *et al.* (2007), dan penelitian Fernandes (2004) dalam Jorge *et al.* (2007).

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, sesuai metode penelitian dan analisis yang dilakukan sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor regulasi, SDM, komitmen, perangkat pendukung, dan pelatihan secara parsial dan bersama-sama (*simultan*) berpengaruh terhadap keberhasilan daerah dalam implementasi PP 71/2010 tentang SAP Berbasis Akrua.
2. Pengaruh faktor regulasi dan SDM terhadap keberhasilan daerah dalam implementasi PP 71/2010 tentang SAP Berbasis Akrua relatif lebih tinggi daripada faktor komitmen, perangkat pendukung, dan pelatihan yang relevan, dengan nilai terendah pada faktor perangkat pendukung. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat pendukung dan adanya pelatihan yang relevan merupakan faktor yang saling melengkapi yaitu adanya perangkat pendukung seperti aplikasi teknologi informasi SIMDA kiranya diperlukan adanya pelatihan yang memadai.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan tersebut, beberapa saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan daerah dalam implementasi PP 71/2010 tentang SAP Berbasis Akrua (regulasi, SDM, komitmen, perangkat pendukung, dan adanya pelatihan yang relevan) memiliki nilai statistik yang rendah, maka disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk memasukkan variabel lain yang diduga turut mempengaruhi keberhasilan daerah dalam implementasi PP 71/2010 tentang SAP Berbasis Akrua antara lain dukungan konsultan dan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Demikian juga penetapan responden terpilih dan jumlahnya perlu ditingkatkan.
2. Variabel perangkat pendukung yang berpengaruh positif terhadap keberhasilan daerah dalam implementasi PP 71/2010 tentang SAP Berbasis Akrua dengan nilai statistik terendah, menggambarkan bahwa adanya perangkat pendukung (*hardware* dan *software*) hendaknya didukung dengan kualitas penyediaan SDM dengan latar pendidikan yang sesuai dan penyelenggaraan pelatihan akuntansi yang memadai dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adirianto, M. 2017. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua pada SKPD Kabupaten Sidoarjo". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 6, No. 11, November 2017.
- Allen, A. and G.D. Sanders. 1994. "Financial Disclosure in US Municipalities: Has the Governmental Accounting Standards Board Made a Difference?". *Financial Accountability & Management*, Vol. 10, No. 3
- Azhar, 2007. "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pada Pemerintah Kota Banda Aceh". Tesis S2 Program Pasca Sarjana USU, Medan.
- Baridwan, Z., 2002. "Sistem Akuntansi", BPFE, Yogyakarta.
- Bastian, I., 2007. "Sistem Akuntansi Sektor Publik". Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

- Chang, C. J., G. Chen, and C. W. Chow. 2008. "Exploring the Desirable and Feasibility of Reforming China's Governmental Accounting System". *J. of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 20 (4), 482-509.
- Christiaens, J., V.V. Peteghem. 2007. "Governmental Accounting Reform: Evolution of the Implementation in Flemish Municipalities". *Financial Accountability & Management*, 23(4), November 2007, 0267-4424.
- Christiaens, J., J. Rommel. 2008. "Accrual Accounting Reforms: Only for Businesslike (Part of) Governments". *Financial Accountability & Management*, 24(1), February 2008, 0267-4424.
- Chow, L. M., G. K. Chau, and S. J. Gray. 1995. "Accounting Reform in China: Cultural Constraints in Implementation and Development". *Accounting and Business Research*, Vol. 26, No. 1, pp. 29-49.
- Coy, D. and K. Dixon. 2004. "The Public Accountability Index: Crafting a Parametric Disclosure Index for Annual Report". *The British Accounting Review*, Vol. 36.
- Danim, S. 2002. "Menjadi Peneliti Kualitatif". Penerbit Pustaka Setia, Bandung.
- Devas, N., B. Binder, A. Booth, K. Davey, R. Kelly. 1998. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Edisi terjemahan, UI Press, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan: Akuntansi Berbasis Akrua, Tantangan Besar Pemerintah: <http://www.perbendaharaan.go.id/new/index.php?pilih=news&aksi=lihat&id=2526>
- Efferin, S., S.H. Darmadji, Y. Tan. 2004. "Metode Penelitian Untuk Akuntansi". Bayumedia Publishing.
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006. "Standar Akuntansi Pemerintahan". BPFE, Yogyakarta.
- Halim et al., A. 2007. "Peranan Akuntansi Sektor Publik Dalam Pemerintahan". *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2007. "Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah". *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2007. "Urgensi Standar Akuntansi Pemerintahan". *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2007. "Pengelolaan Keuangan Daerah". *Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2007. "Akuntansi Keuangan Daerah". Edisi III, Salemba Empat, Jakarta.
- Jorge S.M., J.B.C. Carvalho, and M. J. Fernandes. 2007. "Governmental Accounting in Portugal: Why Accrual Basis is a Problem?". *J. of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 19 (4), 411-446 Winter.
- Komitmen Kerja: <http://www.psiologizone.com/komitmen-kerja>.
- Kuncoro, M. 2007. "Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi". Edisi Ketiga. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Kristiawati, E. 2015. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah Kalimantan Barat". *AKUNTABILITAS*, Vol. VIII, No. 3, Desember 2015
- Mardiasmo, 2004. "Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah". Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009. "Akuntansi Sektor Publik". Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Nordiawan D., 2009. "Akuntansi Sektor Publik". Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Nugroho B. A., 2005. "Strategi Jitu: Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS". Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 41 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
- Putra, I.W.G.Y.D. dan Dodik Ariyanto, 2015. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 13.1 (2015):14-32.
- Ryan, C., T. Stanley and M. Nelson, 2002. "Accountability Disclosures by Queensland Local Government Councils: 1997 – 1999. *Financial Accountability & Management*. Vol. 18, No. 3.
- Sugiyono, 2009. "*Statistika untuk Penelitian*". Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE.900/316/BAKD Tahun 2007 tentang "Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah".
- Tikk, J. 2010. "Accounting Changes in The Public Sector in Estonia". *Business: Theory and Practice*, 2010, 111): 77-85.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusa dan Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.